

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi yang menjadikan pemilu sebagai keniscayaan dimana dalam pemilu terdapat aspirasi rakyat yang dapat dijalankan secara utuh sehingga memudahkan rakyat untuk memilih dan menilai para kontestan pemilu dalam menawarkan visi, misi dan program kandidat sehingga rakyat akan memiliki sebuah gambaran ke mana arah perjalanan negaranya dibawah calon kontestan.¹ Pemilu Indonesia yang berlangsung selama ini mendapatkan apresiasi dan pengakuan bahwa dalam aras demokrasi negara Indonesia termasuk terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Rakyat Indonesia dapat memiliki hak untuk menentukan pemimpin selama 5 tahun mendatang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem pemilu terlihat memiliki perbedaan yang signifikan antara sistem terdahulu dengan sistem saat ini. Sejatinya pemilu sendiri di Indonesia sudah ada sejak tahun 1955 di bawah kepemimpinan presiden Soekarno, dan sampai sekarang ini sudah 11 kali diadakan. Pemilu bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia kemudian disempurnakan kembali pada era reformasi menambahkan asas jujur dan adil menjadi 'LUBERJURDIL'. Kesempurnaan pemilu tidak hanya disempurnakan pada asanya saja tetapi pada tahun 2004 pemilu melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih calon presiden yang diinginkan sesuai kehendak rakyat. Era reformasi ini merupakan awal dari demokrasi yang terbuka dan liberal. Sejarah pemilu tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan reformasi, tepatnya sejak tahun 1997 hingga 1998 dimana pemilu merupakan sebuah produk reformasi yang didesakkan oleh kalangan mahasiswa, intelektual dan kalangan partikelir lain. Pada akhirnya kekuasaan yang awalnya dikuasi oleh elit – elit orde baru kini berbanding terbalik dan berubah menjadi lebih variatif lagi. Pemilu merupakan peranan penting dalam proses seleksi politik, karena dalam pemilu rakyat berserta para konstituen

¹ Aziz, Abdul. 2019. Politik Indonesia Ki. Surabaya. Airlangga University Press. Halaman 39

dapat memilih calon melalui berbagai macam partai politik, untuk memilih wakil yang mencalonkan diri menjadi kontestan pemilu. Pemilu sendiri merupakan suatu prosedur demokrasi dalam melakukan pemilihan pemimpin. Sebagian besar masyarakat mendefinisikan sebagai suatu mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman dibandingkan dengan cara cara yang lain. Hal tersebut menjadikan pemilu sebagai pilar utama dari sebuah proses penggabungan kehendak masyarakat dan sebuah sistem demokrasi.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 merupakan ketiga kalinya pemilihan presiden secara langsung dalam sejarah Indonesia. Pilpres 2014 yang diikuti oleh dua pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa sebagai wakilnya, bersaing dengan pasangan Joko Widodo serta Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Kedua pasangan kandidat tersebut memiliki latar belakang yang jauh berbeda, Prabowo Subianto seperti yang kita ketahui merupakan mantan Panglima Kostrad sedangkan Hatta Rajasa merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masa jabatan 2009-2014, sedangkan Joko Widodo adalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2004-2009.

Persaingan Pemilu tahun 2014 merupakan persaingan yang cukup imbang diantara kedua kubu, karena kedua kandidat calon tersebut bukan merupakan kandidat calon petahana jadi persaingan untuk memperoleh suara rakyat akan menjadi semakin sengit. Dukungan partai politik diantara kedua kandidat ini terbagi menjadi dua koalisi, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi Merah Putih adalah pendukung dari pasangan Prabowo-Hatta yang didukung oleh beberapa partai politik yaitu Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Dan Koalisi Indonesia Hebat sebagai koalisi pendukung pasangan Jokowi-JK didukung oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), terakhir Partai Hati

Nurani Rakyat (HANURA). Jika dibandingkan antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat, pasangan Prabowo-Hatta sedikit lebih unggul dari pasangan Jokowi-JK karena di dalam Koalisi Merah Putih diikuti oleh tujuh partai politik selisih dua partai politik dari Koalisi Indonesia Hebat, dan secara perolehan kursi tingkat DPR RI Koalisi Merah Putih lebih unggul dengan perolehan kursi sebesar 63,54%, angka tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan perolehan Koalisi Indonesia Hebat yang hanya memperoleh 36,46% pada tingkat DPR RI.

Sejarah mencatat Jokowi-Jk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2014-2019, setelah memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden berikut hasil penghitungan resmi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah perolehan suara pasangan Jokowi-JK 70.997.833, selisih 8.421.389 (53,15%) dari pasangan Prabowo-Hatta yang memperoleh suara sejumlah 62.576.444 (46,85%).² Dengan begitu Jokowi-Jk resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014.

Lima tahun sejak tahun 2014, kontestasi elektoral kini akan kembali diselenggarakan untuk keempat kalinya yaitu pada tanggal 17 April 2019 dimana pada hari tersebut proses pemungutan suara berlangsung secara serentak seluruh Indonesia. Pilpres pada tahun 2019 masyarakat kembali dihadapkan dengan dua kandidat calon presiden yang sama yang sebelumnya telah bersaing dalam Pilpres pada tahun 2014. Persaingan dalam ajang kontestasi politik tahun 2019 dapat terbilang sebagai laga *rematch* atau tanding ulang antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Joko Widodo sebagai calon presiden petahana didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, akan bersaing dengan pasangan calon Prabowo Subianto yang didampingi oleh Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Joko Widodo sebagai calon presiden memiliki rekam jejak *track record* yang cukup bagus dan secara tidak langsung unggul atas Prabowo karena Joko Widodo memiliki status sebagai calon petahana dalam persaingan pilpres 2019. Jika dibandingkan dengan lawan politiknya Joko Widodo memiliki nilai lebih dibandingkan Prabowo, karena Joko Widodo sendiri sudah berhasil memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2014

²<https://www.kpu.go.id/koleksigambar/PPWP - Nasional Rekapitulasi 2014 - New - Final 2014 07 22.pdf> diakses pada 6 Maret 2020

dan juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Prabowo sendiri hingga saat ini belum pernah sekalipun menjabat sebagai pemimpin sipil dia hanya pernah menjadi pemimpin militer dan pimpinan partai.

Dalam persaingan pemilu tahun 2019 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin didukung oleh Koalisi Indonesia Kerja yang didukung oleh beberapa partai politik diantaranya : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan dari kubu oposisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno didukung oleh Koalisi Adil Makmur yang didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain mendapat dukungan dari berbagai partai politik kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi serta relawan. Bentuk partisipasi politik oleh masyarakat yang terbentuk oleh faktor – faktor politik diperkuat dengan adanya sikap elit politik terhadap partisipasi sendiri sehingga faktor tunggal yang paling efektif untuk mempengaruhi sifat partisipasi politik di masyarakat ditentukan dengan bagaimana para elit menyikapi partisipasi.³ Identitas bersama suatu masyarakat dapat terbentuk apabila ada sosok tokoh yang disegani dan dihormati karena kepemimpinannya yang karismatik atau dicintai oleh masyarakat, karena pemimpin yang memiliki sifat tersebut akan menjadi pemersatu masyarakat dan akan menjadi panutan dalam masyarakat.⁴ Dengan adanya dukungan dari berbagai organisasi dan relawan, dukungan tersebut pastinya akan sangat membantu para kandidat calon presiden dan wakil presiden untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat diberbagai daerah. Adanya peran relawan atau *volunteerisme* dalam kontestasi elektoral

³Surbakti, Ramlan. 1984. Dasar Dasar Ilmu Politik. Surabaya. Airlangga University Press.

Halaman 39

⁴ Ibid. Ha : 126

memiliki peran yang sangat besar untuk memobilisasi basis dukungan suara untuk memenangkan kandidat yang diusung, karena relawan mampu menjangkau sektor-sektor yang tidak mampu dijangkau oleh partai politik seperti *floating mass*, pemilih pemula, dan para pemilih penggerak ekonomi kreatif.⁵ Relawan muncul sebagai gerakan politik non elitis, non partisan, mandiri, bergerak masif dan dinamis, dengan karakteristik mampu berpartisipasi secara politik tanpa partai politik.

Salah satu relawan yang paling fenomenal dalam kesuksesan Jokowi pada Pilpres 2014 adalah organisasi Projo (Pro Jokowi). Projo merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh para pendukung Presiden RI-7. Relawan Projo yang terbentuk pada tanggal 23 Desember 2013 hingga saat ini masih terus eksis dalam melakukan dukungan – dukungan terhadap Jokowi, eksistennya tersebar diseluruh pelosok wilayah Indonesia dan memiliki jumlah anggota ratusan ribu, sosok kepemimpinan Jokowi ini lah yang membuat para anggota Projo tetap setia mendukungnya hingga pemilu tahun 2019. Kesetiaan relawan Projo tidak hanya di beberapa daerah saja melainkan tersebar dari Sabang sampai Merauke, terorganisir dari level Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang memiliki tujuan bersama untuk memenangkan Jokowi satu kali lagi.

Di Kabupaten Jombang organisasi atau relawan pendukung Jokowi yang paling solid adalah Projo. Deklarasi dukungan Projo Jombang terhadap Jokowi – Ma'ruf telah dilaksanakan pada hari Minggu 20 Januari 2019 di gedung olah raga (GOR) Merdeka Jombang deklarasi ini melibatkan ribuan massa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat.⁶ Acara yang digelar DPC Projo Jombang hadir oleh ketua DPD Projo Jatim tak ketinggalan partai pengusung dan relawan – relawan. Dimeriahkan dengan konvoi paguyuban tukang becak dan sopir angkutan serta acara hiburan rakyat. Adanya deklarasi tersebut diharapkan dapat kembali melakukan aksi dan merapatkan barisan dari berbagai elemen untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memenangkan Jokowi sebagai Presiden masa jabatan 2019 - 2024. Hadirnya relawan pada pilpres 2019 tidak dapat dianggap remeh, karena

⁵Alam, Mangku. 2017. "Relawan : Dari Gerakan Sosial ke Proyek Politik". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 10. Halaman 140-149

⁶<https://www.lensaIndonesia.com/2019/01/21/ribuan-massa-projo-jombang-deklarasi-dukung-jokowi-maruf.html> diakses 16 Maret 2019

apabila memiliki basis yang besar peran relawan sangat memungkinkan untuk memenangkan pasangan calon presiden yang diusung. Ditambah lagi dengan situasi krisisnya kepercayaan terhadap partai politik pada saat ini menjadikan relawan sebagai kekuatan baru. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul "Peran Kelompok Kepentingan Dalam Pilpres 2019 : Studi Tentang Organisasi Pro Jokowi (PROJO) Di Kabupaten Jombang"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang rumusan masalah yang diusung dalam penelitian ini ialah:

1. Apa saja upaya Projo dalam memenangkan Pilpres 2019 di Kabupaten Jombang?
2. Apa hambatan konsolidasi Projo untuk memenangkan Pilpres 2019 di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Mengetahui apa saja upaya Projo dalam memenangkan Pilpres 2019 di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui apa hambatan konsolidasi Projo untuk memenangkan Pilpres 2019 di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan secara mendalam bagaimana upaya Projo di Kabupaten Jombang untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Jombang dalam Pemilu 2019.

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dibidang keilmuan, terlebih pada pengembangan studi ilmu politik yang mengkaji model – model kelompok kepentingan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan kumpulan dari berbagai orang yang memiliki kesamaan sudut pandang, sikap, kepercayaan atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk mencapai sebuah tujuan.⁷ Kelompok kepentingan ini tidak sekedar kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, akan tetapi kelompok ini memiliki struktur keanggotaan yang jelas serta memiliki sumber keuangan sebagai pembiayaan kegiatan acara yang dilakukan serta memiliki hubungan komunikasi baik dari dalam kelompok maupun luar kelompok.⁸ Ada beberapa tipe kelompok kepentingan yang berkembang di masyarakat dimana tujuan mereka masih sama, yakni berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Wujud kelompok kepentingan ini dapat berupa: Kelompok profesional, organisasi politik, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, asosiasi cendekiawan, asosiasi perusahaan, organisasi etnik, daerah, keturunan lain-lain. Kekuatan kelompok kepentingan berasal dari bagaimana status keanggotaan di masyarakat serta sumberdaya pendukungnya, baik manusia maupun dana dan relasi yang dimiliki. Kelompok kepentingan biasanya menentukan agenda, menggiring isu, menyebarkan gagasan, sebagai pendesak pemerintah dan perumus kebijakan. Meskipun tujuan mereka untuk mewakili kepentingan publik yang terbatas (kepentingan anggotanya), tetapi banyak pula dari anggota kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki ambisi bersifat pribadi.

Kelompok kepentingan terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, kelompok kepentingan privat dan kedua, kelompok kepentingan publik. Kelompok kepentingan privat yaitu kelompok kepentingan yang memiliki usaha untuk memperjuangkan kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya, meliputi golongan tertentu. Pada konteks umum, yang diwakili meliputi: dokter, guru, pengacara, akuntan, dosen, hakim, pengacara, serta golongan profesional termasuk

⁷ Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik”, (Jakarta: GRASINDO, 2010). : Hal 140

⁸ Ibid : Hal 140

juga buruh. Disamping itu, kelompok kepentingan yang bersifat publik yaitu kelompok kepentingan yang hanya berorientasi untuk mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan yang bersifat menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang kepentingan dari anggota-anggotanya.

Kelompok kepentingan tentu saja berbeda dengan partai politik dan kelompok penekan. Kelompok ini memiliki fokus perhatian terhadap implementasi sebuah kepentingan tertentu kepada pemerintah yang bertujuan agar pemerintah dapat menampung aspirasi kelompok tersebut untuk dijadikan sebuah kebijakan. Perbedaan signifikan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan yaitu aksi yang dilakukan serta objek sasaran. Maksudnya adalah terbentuknya atau lahirnya kelompok penekan terjadi disaat ada sebuah fenomena – fenomena kasus tertentu yang mana setelah aksinya berhasil dilakukan mereka membubarkan diri, cara mereka melakukan aksinya dengan cara mempengaruhi serta menekan pejabat pemerintah untuk menyetujui permohonan mereka yang terkesan memiliki paksaan. Sedangkan perbedaan kedua antara kelompok kepentingan dengan partai politik yaitu terletak pada fungsi itu sendiri, mengapa demikian karena partai politik memiliki fungsi mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum serta tindakan – tindakan lainnya sesuai prosedur yang berlaku yang bertujuan untuk memperjuangkan sebuah kebijakan umum menjadi sebuah keputusan politik.⁹ Fungsi tersebut yang tidak dimiliki oleh sebuah kelompok kepentingan walaupun pada dasarnya kelompok kepentingan melakukan dukungan terhadap calon atau partai politik secara tidak langsung.

Kelompok kepentingan memiliki perbedaan yang dibedakan menjadi beberapa tipe tertentu dengan berbagai acuan, jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan terbagi dalam beberapa jenis kelompok kepentingan seperti, kelompok kepentingan profesi, kelompok kepentingan okupasi, kelompok kepentingan kerohanian, kelompok kepentingan hobi, kelompok kepentingan lingkungan hidup, kelompok kepentingan gender, kelompok kepentingan kepemudaan.¹⁰ Kelompok kepentingan yang mengacu kepada lingkungan yang dimaksud adalah kelompok

⁹ Ibid : Hal 140

¹⁰ Ibid : Hal 141

kepentingan yang berperan dalam lingkup yang terbatas, seperti kelompok tani, pengajar / guru, serta pegawai ASN (aparatur sipil negara). Selain kelompok kepentingan yang dijelaskan diatas ada juga kelompok kepentingan yang memiliki cakupan yang luas dalam memperjuangkan kepentingannya, seperti contoh LBH (lembaga bantuan hukum) dan lembaga konsumen.

Gabriel Almond mengklasifikasi kelompok kepentingan terbagi menjadi empat tipe sesuai dengan cara dan metode dalam mengajukan sebuah kepentingan.¹¹ Pada urutan pertama ada kelompok kepentingan anomik, dalam proses pengajuan kepentingan kelompok kepentingan anomik ini berorientasi secara melakukan tindakan yang spontan. Contoh proses pengajuan kelompok kepentingan ini diantaranya demonstrasi, mogok kerja, kekacauan dan masih banyak lagi aksi – aksi yang dilakukan dalam memperjuangkan kepentingannya. Disebut kelompok kepentingan anomik karena kelompok ini memiliki individualitas yang kurang jelas. Kedua, terdapat kelompok kepentingan non asosiasi, terbentuknya kelompok kepentingan ini mengacu kepada sebuah kesamaan kepentingan yang sedang diperjuangkan. Kelompok ini melakukan aksinya dengan cara melakukan pendekatan kepada pemerintah secara in formal. Contoh kelompok kepentingan non asosiasi ini yaitu, kelompok kepentingan suku, kelompok kepentingan warna kulit atau ras, kelompok kepentingan yang mengandung unsur kedaerahan. Kelompok kepentingan non asosiasi setelah mencapai tujuan bersama, mereka membubarkan diri karena kegiatan – kegiatan acara kelompok ini sifatnya kontemporer. Ketiga, kelompok kepentingan institusional atau kelembagaan, kelompok kepentingan institusional adalah kelompok yang hadir dalam tubuh suatu lembaga – lembaga dan pemerintahan, akan tetapi kehadiran kelompok ini berfungsi bukan untuk memanifestasikan sebuah kepentingan, kelompok kepentingan ini muncul dalam sebuah lembaga angkatan bersenjata, partai, birokrasi, memiliki pengaruh kuat terhadap lahirnya sebuah keputusan karena anggota – anggota mereka memiliki posisi strategis dalam sebuah lembaga sehingga eksistennya memiliki pengaruh yang sangat kuat meskipun cenderung

¹¹ Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell. 1978. *Comparative Politics; System, Process, and Policy*. Boston : Little. Brown, pada bab VII

mememtingkan kepentingan sendiri. Keempat, kelompok kepentingan asosiasional yang mana kelompok kepentingan ini secara intens berfokus untuk memformulasikan kepentingan kelompok. Kelompok kepentingan ini memiliki pola yang terstruktur, dan secara berkelanjutan memiliki hubungan yang berkesinambungan antar anggota – anggotanya serta membangun hubungan dengan pemerintah. Contoh kelompok kepentingan yang tergolong kelompok kepentingan asosiasional adalah himpunan pengusaha swasta, organisasi buruh di luar perusahaan, dan ikatan dokter. Posisi keanggotaan yang ada di masyarakat dan kualitas sumberdaya pendukung meliputi sumber daya manusia, pendanaan serta relasi merupakan kekuatan utama dalam sebuah kelompok kepentingan. Langkah yang dilakukan kelompok kepentingan diantaranya melakukan penyusunan agenda, menggiring isu, mensosialisasikan gagasan, berperan sebagai pengawas pemerintah dan merumuskan kebijakan. Sebagian besar kelompok kepentingan bertujuan untuk mewakili kepentingan anggota – anggotanya akan tetapi dalam sebuah anggota kelompok tersebut ada yang memiliki ambisi untuk kepentingan yang bersifat pribadi.

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum (pemilu) merupakan cara dalam berdemokrasi dengan melibatkan rakyat secara langsung untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin negara presiden, wakil – wakil rakyat pada lembaga legislatif dan juga merupakan pemenuhan hak asasi warga negara pada bidang politik. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan proses penting terhadap individu yang akan bersaing untuk memperoleh kursi jabatan politik tertinggi di negara ini. Pemilihan umum yang lebih dikenal dengan sebutan pemilu adalah kegiatan yang akan digunakan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu sendiri memiliki beberapa fungsi di antaranya :

1. Hak rakyat untuk memilih pejabat publik dalam rangka pembentukan pemerintahan

2. Sebagai sarana pertanggung jawaban pejabat publik
3. Sebagai alat pendidikan politik rakyat yang transparan atau terbuka

Pemilu juga memiliki kriteria dasar diantaranya seperti, hak pilih rakyat bersifat pasif dan aktif, artinya warga negara yang sudah berkapasitas untuk mengikuti pemilu berhak memberikan hak pilihnya bersifat pasif dan aktif, akan tetapi hak pilih tersebut tidak dapat diwakilkan satu orang satu suara dan setiap warga hanya berkesempatan satu kali untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu bobot suara setiap warga sama bobotnya tidak ada perbedaan seperti yang sudah diatur dalam undang – undang. Adanya kegiatan pemilu ini dilakukan secara periodik setiap 5 tahun sekali. Adanya sosok figur untuk calon pemimpin akan dapat terwujud atas dasar aspirasi dan keinginan yang kuat dari rakyat terhadap sosok figur yang dianggap ideal untuk dijadikan pemimpin.

Pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang jatuh pada tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu presiden dan wakil presiden ini nantinya akan menentukan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden terpilih dan akan menjadi presiden Republik Indonesia pada periode 2019 hingga 2024. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1), Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

1. Langsung yang dimaksud berarti rakyat sebagai peserta pemilu yang merupakan pemilih memiliki tugas untuk menentukan pilihannya dalam setiap pemilu, tentunya dalam menentukan pilihan tersebut para peserta pemilu tidak dapat mewakilkan pilihannya.
2. Umum yang dimaksud berarti semua warga negara yang telah cukup umur 17 tahun keatas dapat menentukan hak pilihnya dan ikut berpartisipasi dalam proses pemilu.
3. Bebas yang dimaksud berarti setiap warga negara dibebaskan dalam menentukan sebuah pilihan, menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak tertentu serta dipastikan terjamin keamanannya.
4. Rahasia yang dimaksud berarti para peserta pemilu sendirilah yang mengetahui pilihannya sendiri tanpa sepengetahuan pihak lainnya.

5. Jujur dalam penyelenggaraan pemilu yang dimaksud seluruh penyelenggara pemilu baik itu peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan semua pihak yang terlibat dalam berlangsungnya proses pemilu wajib bersikap jujur dan mematuhi sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Adil yang dimaksud berarti segala yang mengikuti jalannya proses pemilu memiliki kesetaraan hak yang sama, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus serta diskriminasi.

Pemilu di Indonesia adalah salah satu hak yang diperoleh masyarakat jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya harus menjaga pemilu agar terlaksana dengan lancar agar hak-hak setiap warga negaranya dapat terlaksana. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu. Pemilihan umum dalam penelitian ini adalah Pemilu 2019 khususnya Pileg 2019.

1.6.2 Konsolidasi

Konsolidasi politik adalah integrasi dari beberapa kelompok yang ada pada masyarakat di dalam sebuah negara bertujuan untuk memanifestasikan satu kesatuan yang lebih solid untuk mewujudkan tujuan bersama. Konsolidasi Menurut O'Donnel dan Schmitter, konsolidasi adalah upaya proses penggabungan beberapa elemen dalam demokrasi untuk bekerjasama sehingga tercipta sebuah hubungan yang memudahkan proses demokratisasi politik.¹²

Unsur penting lainnya dalam konsolidasi yaitu kesepakatan bersama yang berkaitan dengan nilai-nilai politik yang bisa mendekatkan dan mempertemukan elemen-elemen politik diatas menjadi suatu kekuatan yang melebur menjadi satu tujuan. Konsolidasi politik merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan dengan upaya memperkuat serta menyatukan beberapa kekuatan politik agar menjadi satu

¹² Guillermo O' Donnel dan Phillipe C. Schmitter.1993. *Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

untuk membentuk sebuah solidaritas dan hubungan yang erat antar anggota organisasi.

Yang berperan langsung dalam sebuah proses konsolidasi politik diantaranya yakni organisasi, lembaga – lembaga, kelompok kepentingan, para elite politik, masyarakat, partai politik, dan organisasi. Komponen fundamental dalam sebuah konsep konsolidasi yakni kesepakatan bersama yang saling memiliki kaitan dengan aspek – aspek politik yang nantinya dapat mempertemukan anggota – anggota yang disebutkan di atas untuk terciptanya sebuah kekuatan dan tujuan bersama. Upaya – upaya yang dilakukan guna mempererat sebuah hubungan yang dilandasi dari berbagai kekuatan politik untuk melebur menjadi satu, yang bertujuan untuk terciptanya hubungan yang solid antar anggota – anggota organisasi. Menurut Larry Diamond konsolidasi merupakan fase dimana sebuah unsur pendukung demokrasi diperkuat. Konsolidasi dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: elite politik, organisasi politik dan massa.¹³ Selain itu konsolidasi merupakan sebuah proses untuk mematangkan demokratisasi di sebuah Negara.

Dalam ajang sebuah persaingan pilpres 2019 konsolidasi berperan penting, dengan terjalannya sebuah hubungan yang harmonis tentu akan berdampak positif untuk mempererat dan memperkuat organisasi yang mendukung pasangan Capres – Cawapres yang didukung. Terjalannya konsolidasi politik yang hadir dalam sebuah organisasi diharapkan terbentuknya sebuah hubungan yang kuat dan solid yang pada akhirnya tercipta sebuah organisasi yang optimal dalam menyatukan sudut pandang dan tujuan untuk bersama – sama menyusun strategi dalam pilpres 2019. Dengan bermodalkan sebuah hubungan konsolidasi yang kuat maka upaya – upaya yang akan dilakukan akan berjalan dengan optimal, diawali dari sikap organisasi Projo dengan organisasi internalnya lalu bagaimana langkah Projo mengkonsolidasikan dirinya untuk memenangkan Jokowi – Ma'ruf. Dalam penerapan konsolidasi ini yang sering dilakukan biasanya diawali dengan menciptakan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi untuk menyusun dan melaksanakan program – program kampanye guna

¹³ Larry Diamond. 2003. *Developing Democracy toward Consolidation* (alih bahasa Tim Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta: IRE Press.

memenangkan pasangan calon yang diusung. Dalam konsolidasi politik yakni bagaimana cara merumuskan sebuah kampanye politik yang dapat membentuk citra politik. Hadirnya konsolidasi pada massa kampanye penting untuk dirumuskan sebuah perencanaan yang matang, eksekusi yang matang, hingga tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan merupakan peranan yang sangat penting, karena pada tahap ini organisasi harus menentukan secara matang target sasaran mereka untuk ikut bersama – sama mendukung pasangan yang diusung. Adanya hubungan yang solid dalam organisasi kemenangan sangat membantu upaya – upaya yang dilakukan agar memiliki posisi yang memiliki nilai tersendiri di hati masyarakat. Dengan melakukan sebuah ciri khas khusus sebagai atribut yang digunakan agar memiliki ciri khas dan menjadi pembeda dengan oposisi. Selain itu organisasi harus mengemas gaya berkampanye semenarik mungkin mulai dari kostum yang digunakan dan tutur berbicara yang tepat sehingga dapat memiliki daya tarik terhadap semua golongan. Ciri khas lainnya yang harus dimiliki oleh organisasi kemenangan yakni adanya sebuah slogan atau jargon, hal ini juga tidak kalah penting karena dengan adanya sebuah slogan serta orasi yang memikat akan menarik pendukung baru dan ikut serta untuk memilih pemimpin yang sama. Agar menjadi sebuah organisasi yang kuat dalam melakukan upaya memenangkan pasangan calon yang diusung maka dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi. Pertama, figure pemimpin yang memiliki kredibilitas serta memiliki posisi strategis dalam proses politik. Hal ini berkaitan dengan koneksi informal hingga internal yang dapat mempengaruhi pendukungnya untuk mewujudkan maksud tujuan yang diinginkan. Kedua, memelihara kepercayaan masyarakat dengan secara intens merawat ketokohan dan lembaga. Ketiga, mewujudkan hubungan yang memiliki nilai – nilai solidaritas antar anggota, baik visi maupun visi, gaya berbahasa serta, dan gaya berpakaian.

Dalam penguatan konsolidasi biasanya organisasi politik perlu membuat strategi kemenangan bersama. Ada 3 jenis strategi yaitu:

1. Keberadaan sosok pemimpin politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik. Hal tersebut sangat penting menyangkut hubungan informal dan

personal untuk menggerakkan pendukungnya demi mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Selalu merawat ketokohan maupun kelembagaan yang ada akan berpengaruh pada kredibilitas tersendiri di masyarakat.
3. Menciptakan kebersamaan antar internal, seperti kebersamaan, persamaan visi & misi, Bahasa, serta gaya berpakaian.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis telah focus menentukan lokasi disertai dengan pemilihan masalah yang sudah disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis memilih lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur topik yang akan dibahas pada penelitian ini tentang bagaimana peran kelompok kepentingan Projo dalam memenangkan pasangan Jokowi – Ma'ruf pada Pilpres 2019.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang tujuannya berupaya agar penelitian ini dapat menyajikan dan menggambarkan sebuah kasus yaitu dengan cara menggali data dan memastikan sebuah fenomena atau realita sesuai data dan fakta yang ada di lapangan dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan mengumpulkan data yang didapat dari berbagai informan yang terpilih dan terpercaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. Data – data dari informan ini yang nantinya akan digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber informan terpilih dan dipercayan yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah

1. Joko Fattahrochim (Ketua Projo Jombang)

2. Anang (Seketaris Projo Jombang)

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini bertempat di Jombang Jawa Timur yang mana peneliti memilih melakukan interaksi wawancara di kantor DPC Projo Jombang, serta pasar tradisonal Jombang untuk wawancara kepada pemilih pendukung Jokowi – Ma'ruf

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang untuk melakukan sebuah penelitian yang terpenting yaitu penulis wajib mengumpulkan data, data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini peneliti wajib mencatat informasi dan melakukan dokumentasi peristiwa saat penelitian berlangsung. Cara yang dilakukan peneliti untuk menunjang penelitian ini diantaranya.

1.8.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik yang diterapkan oleh penulis dalam pengambilan data secara langsung dengan bertatap muka dan melakukan komunikasi dua arah melakukan tanya jawab yang dengan informan, yang mana pertanyaan – pertanyaan penulis yang ditanyakan tentunya sudah terstruktur dan terencana yang beracuan dengan penelitian yang dilakukan.

1.8.2 Data Pemerintah

Pengumpulan data yang diperoleh penulis dari data pemerintah bertujuan sebagai data penunjang yang berisi data hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019. Yang nantinya data tersebut akan dijadikan peneliti sebagai pelengkap data untuk melakukan analisis temuan data dalam penelitian ini

1.8.3 Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data oleh penulis yang dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan secara digital untuk memudahkan

penelitian ini. Peneliti menggunakan alat perekam suara dan alat perekam gambar serta alat lainnya yang memudahkan peneliti untuk proses data.

1.9 Jenis Data

Pada penelitian ini data yang diolah didapat dari data primer dan data skunder. Maksud dari data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh atas proses wawancara dengan informan terpilih. Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari suatu badan atau lembaga yang ada sangkutpautnya topic permasalahan yang sedang dibahas.

1.10 Teknik Analisis Data

Teknik yang diterapkan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Setelah mendapatkan data dari beberapa proses tahapan pengumpulan data pertama – tama penulis mulai mengolah data dari penelitian pendahuluan hingga tercapainya usulan penelitian. Kedua yaitu pengolahan data yang dilakukan secara intens yang mengacu pada perolehan data pada saat penulis melakukan wawancara pada informan dan pengumpulan informasi yang didapat pada saat melakukan pengamatan di lapangan. Ketiga yaitu koreksi dari pengolahan pertama dan kedua dengan pengecekan keabsahan dari hasil wawancara yang dikomparasikan dengan data yang diperoleh dari informasi – informasi yang ada keterkaitan dengan penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis yang nantinya akan menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan analisis triangulasi (gabungan). Tujuan dari dilakukannya pendekatan triangulasi yaitu untuk menggali kebenaran informasi dari berbagai metode dan perolehan data. Dari hadirnya bukti – bukti maka akan diperoleh sudut pandang yang berbeda tentang fenomena yang diteliti. Berbagai sudut pandang akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang akurat.